

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Hamid S.A, 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita 1-Pelita IV*, Disertasi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Andi Hamzah dan RM Surachman, "Pre-Trial Justice and discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara" Sinar Grafika, Jakarta. 2014.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2017.
- Arifm Rahman, 1998. *Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Struktural-Fungsional*, SIC, Cet,I, SIC.
- Asep N Mulyana, 2020, *Hukum Pidana Militer Kontenporer*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2020.
- Buaton, Tiarsen, 2011, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Kedudukan Dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2010*), PT Galaxy Puspa Mega.
- Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996. Hal. 2.
- Djoko Prakoso dan I ketut Murkita, 1987. *Mengenal Lembaga kejaksaan di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- E. M. Award, 1995. *System Analisis and Design, dalam Eko Budihardjo, Tata Ruang Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Universitaas Pers. Cet 1. Yogyakarta.

- Guideline on the Role of Prosecutors, ditetapkan oleh Kongres ke delapan PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana, di Havana, Cuba, 27 Agustus-7 September 1990.
- Jan S. Maringka, 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum 2009*. Media Grup. Surabaya.
- Kejaksaan RI, 2004. *Restrukturisasi Organisasi Kejaksaan*. Jakarta.
- Komisi Hukum Nasional, 2008. *Problematika penegakan Hukum (Kajian reformasi Lembaga penegak hukum*, Jakarta.
- Laporan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer*, Kejaksaan RI, 2021.
- Laurensius Arliman S, 2015. *Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat*. Deep Publish. Yogyakarta.
- Lawrence M Friedman, 1977. *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeia. Bogor.
- Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CV Sinar Bakti, Jakarta,
- Muhammad Junaidi, 2018. *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media. Yogyakarta.

- Muhammad Junaidi, 2018. *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media. Yogyakarta.
- Nur Basuki Winanmo, 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
- R. Subekti, 1993. *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang A/am Datang*. Makalah dalam Seminar Huk."U111 Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II: Binacipta. Bandung.
- Sarwoto, 1991. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalian Indonesia,
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1992. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta,
- . 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sondang P.Siagian. 1989. *Filsafat Administrasi*.CV Haji Masagung. Jakarta.
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung,
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty. Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung.
- Tiarsen Buaton. 2016. *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung*, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Editor), *Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang. Jakarta.
- Wayne LaFavre. 2002. *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Arifin Hoesin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press. Malang.

Jurnal

- Basri, H. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, 2(2), 104-121.
- Dessy Debrilianawati, W., Saleh, C., & Hadi, M. (2013). *Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Masyarakat Di Lembaga Masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik, 1(2).
- DP, S. H. (2018). *Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia*. Pakuan Law Review, 4(1), 24-48.
- Furqan, H., & Sidiq, M. (2019). *Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Kota Sigli)*. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 3(1), 71-89
- I Gusti Ketut Ariawan, *Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 3 Tahun 2021, hlm 482-492.
- Keni, L. (2021). *Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lex Crimen, 10(7).
- Mau, H. A., & Sinaulan, R. L. (2021). *Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 15(1), 15-19.
- Misran Wahyudi, "Analisis Independensi Oditur Militer dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer lii-14 Denpasar dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan." Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*) 4, no. 3 (2015).
- Muhammad Ihsan, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 10 No. 2 (2021), hlm 5524-5537.
- Pananjung, M. D. P., Chairunnisa, P., & Triayu, R. (2017). *Penerapan Eksaminasi Aktif terhadap Putusan Hakim disertai Prinsip Reward-and-Punishment dalam Rangka Mewujudkan Lembaga Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas*. Padjadjaran Law Review, hlm 5.

- Pangestuti, E. (2020). *TUGAS Penyidik Di Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Residivis*. Yustitiabelen, 6(2), 76-97.
- Priyono, E. A., & Benuf, K. (2020). *Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum*. Jurnal Suara Hukum, 2(1), 54-70.
- Slamet Sarwo Edy, "*Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*." Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 1 (2017): 105-128.
- Soniardhi, Soniardhi. "Kewenangan Ankum Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Disiplin Militer." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 6, no. 4 (2017): 464-477.
- Sugiarto. "*Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 2 (2018): 165-176.
- Syamsuddin, A. (2017). *Kajian tentang anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas Menurut Kuhap*. Lex Crimen, 6(6), 64-71.
- Tambunan, D. G. (2019). *Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer. Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer*, (ii, 10p).
- Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 2 (2018): 238-249.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia

SITUS WEB

<https://www.dilmilti-jakarta.go.id/main/index.php/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia.html> Diakses tanggal 01 Oktober 2022.

<https://www.hukumoline.com//0210/05/utama/mund01.htm>, diakses tanggal 01 Oktober 2022.

Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, -
[https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter.p](https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf)
df. Diakses tanggal 02 Oktober 2022.

suara.com, Relasi Fungsional Jaksa dan Oditur Militer, available at www.suara.com, 2020 diakses tanggal 01 Oktober 2022.

Suhadibroto,refresionalisasi kinerja kejaksaan, <http://www.khn.or.id>, diunduh tanggal 07 Maret 2012. Suhadibroto menyatakan bahwa kinerja keJaksaaan ditentukan atau dipengaruhi beberapa faktor, yaitu Jaksa Agung. Jaksa Agung sebagai pejabat fungsional dan organisasi.

www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, diakses pada tanggal 02 Oktober 2022